



Diversity UIKA Bogor
E-ISSN: 2776-9798

Diversity
JURNAL ILMIAH PASCASARJANA

<http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/diversity>

Dinamika Kegagalan Pasar dan Peranan Pemerintah dalam Menopang Stabilitas Ekonomi Nasional

Siti Suwaibah

Universitas PGRI Wiranegara, Indonesia

*Corresponding author e-mail: sitisuwaibah868@gmail.com

DOI : [10.32832/diversityjournal.v6i1.22465](https://doi.org/10.32832/diversityjournal.v6i1.22465)

ABSTRAK

Kegagalan pasar terjadi ketika mekanisme pasar tidak mampu menjalankan fungsi alokasi secara efisien, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan dalam distribusi sumber daya dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kondisi tersebut, pemerintah memiliki peran penting untuk mengoreksi distorsi melalui berbagai instrumen kebijakan publik. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara kegagalan pasar dan peranan pemerintah dalam menjaga keseimbangan perekonomian nasional. Penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui analisis literatur mengenai teori ekonomi publik, kebijakan fiskal dan moneter, serta sejumlah kasus empiris di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa intervensi pemerintah melalui penyediaan barang publik, penegakan hukum persaingan usaha, stabilisasi harga, dan kebijakan redistribusi pendapatan berkontribusi besar dalam mengurangi dampak kegagalan pasar. Meski demikian, penerapan kebijakan tersebut masih menghadapi kendala seperti birokrasi yang belum efisien, tumpang tindih regulasi, dan lemahnya koordinasi antar lembaga negara. Oleh karena itu, perbaikan tata kelola, peningkatan transparansi, dan penguatan sinergi antar sektor menjadi langkah penting untuk memastikan kebijakan pemerintah berjalan efektif dalam menjaga stabilitas dan menciptakan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif

Kata kunci: Kegagalan pasar, peran pemerintah, barang publik; kebijakan fiskal, stabilitas ekonomi

The Dynamics of Market Failure And the Role of Government in Supporting National Economic Stability

ABSTRACT

Market failure occurs when market mechanisms fail to allocate resources efficiently, resulting in imbalances in resource distribution and public welfare. Under these conditions, the government plays a crucial role in correcting these distortions through various public policy instruments. This article aims to examine the relationship between market failure and the government's role in maintaining national economic balance. This research uses a qualitative descriptive approach, analyzing literature on public economic theory, fiscal and monetary policy, and several empirical cases in Indonesia. The research findings indicate that government intervention through the provision of public goods, enforcement of competition laws, price stabilization, and income redistribution policies significantly mitigate the impact of market failure. However, the implementation of these policies still faces obstacles such as inefficient bureaucracy, overlapping regulations, and weak coordination between state institutions. Therefore, improving governance, increasing transparency, and strengthening synergies between sectors are crucial steps to ensure effective government policies in maintaining stability and creating more inclusive economic development.

Keyword: Market failure, role of government, public goods; fiscal policy, economic stability

PENDAHULUAN

Dalam sistem ekonomi modern, pasar sering kali dianggap sebagai mekanisme utama dalam mengatur alokasi sumber daya. Melalui interaksi antara pelaku ekonomi, pasar diharapkan mampu menghasilkan keseimbangan yang efisien secara otomatis. Konsep invisible hand yang diperkenalkan oleh Adam Smith menjadi dasar pemikiran bahwa keputusan individual dapat membawa manfaat kolektif bagi masyarakat. Namun, kenyataannya mekanisme tersebut tidak selalu berjalan sesuai harapan. Pasar sering kali dihadapkan pada berbagai ketidaksempurnaan yang menyebabkan alokasi sumber daya tidak optimal dan bertentangan dengan prinsip efisiensi maupun keadilan sosial. Kondisi kegagalan pasar dapat terlihat dari munculnya eksternalitas negatif seperti polusi, dominasi pelaku usaha besar yang memicu monopoli dan oligopoli, ketimpangan informasi antara produsen dan konsumen, serta keterbatasan penyediaan barang publik yang tidak menguntungkan secara komersial. Situasi-situasi tersebut mengakibatkan pasar tidak mampu menjaga keseimbangan ekonomi tanpa adanya campur tangan dari pihak lain. Dalam konteks nasional, kegagalan pasar bahkan dapat memperbesar kesenjangan sosial-ekonomi, menimbulkan instabilitas harga, dan menghambat proses pembangunan jangka panjang.

Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi tantangan yang cukup besar dalam mengelola struktur perekonomian yang kompleks. Ketergantungan pada sektor-sektor tertentu, ketimpangan antarwilayah, serta minimnya pemerataan akses terhadap layanan dasar menjadi gambaran nyata adanya ketidaksempurnaan pasar. Fluktuasi harga pangan, gejolak harga energi, hingga lemahnya pengawasan terhadap praktik persaingan usaha merupakan contoh yang sering terjadi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mengandalkan mekanisme pasar semata tidak cukup untuk mencapai keseimbangan perekonomian yang stabil dan inklusif.

Oleh karena itu, peran pemerintah menjadi sangat penting dalam memastikan agar pasar dapat berfungsi secara lebih efektif. Pemerintah bertanggung jawab menyediakan barang publik yang tidak dapat disediakan oleh swasta, menjaga regulasi agar persaingan berjalan sehat, menstabilkan inflasi dan nilai tukar, serta menjalankan kebijakan fiskal yang mendukung pemerataan pendapatan. Intervensi pemerintah bukan hanya bersifat korektif terhadap distorsi pasar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas makroekonomi yang berkelanjutan. Namun, efektivitas peran pemerintah dalam mengatasi kegagalan pasar tidak selalu berjalan optimal. Tantangan seperti birokrasi yang lambat, koordinasi antar lembaga yang kurang harmonis, serta inkonsistensi regulasi sering kali menghambat pencapaian tujuan kebijakan. Selain itu, kapasitas fiskal dan kesiapan lembaga pelaksana juga

memengaruhi sejauh mana intervensi pemerintah dapat memberikan hasil yang maksimal

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan rancangan studi kualitatif yang bersifat deskriptif, yang berfokus pada penjelasan mendalam mengenai kondisi kegagalan pasar serta bentuk keterlibatan pemerintah dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional. Pendekatan ini dipilih untuk memungkinkan peneliti memahami fenomena ekonomi secara holistik melalui interpretasi terhadap data non-numerik yang bersumber dari berbagai publikasi. Data penelitian dihimpun sepenuhnya melalui penelaahan literatur (*library research*). Berbagai dokumen seperti artikel jurnal, laporan kebijakan, buku ekonomi publik, rilis resmi kementerian, publikasi Bank Indonesia, serta laporan penelitian terkait dijadikan rujukan utama. Informasi dari kasus nyata seperti dinamika harga komoditas, hambatan struktur pasar, dan kebijakan fiskal-moneter juga dianalisis untuk memperkaya konteks pembahasan.

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi, memilih, dan mengklasifikasikan sumber yang sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya seluruh data dianalisis menggunakan teknik analisis isi, yaitu metode untuk menafsirkan makna dari teks dengan meninjau kembali tema-tema utama, kecenderungan masalah, dan hubungan antara konsep yang ditemukan. Tahapan analisis mencakup pemilihan informasi inti, penyusunan pola temuan, serta perumusan interpretasi akhir.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggambarkan bagaimana ketidaksempurnaan pasar muncul dan bagaimana kebijakan pemerintah dijalankan untuk menanggulangi berbagai distorsi tersebut. Dengan demikian, metodologi ini memberikan dasar analitis yang kuat untuk memahami hubungan antara peran negara dan dinamika kegagalan pasar dalam perekonomian nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kegagalan Pasar dalam Perekonomian Indonesia

Kegagalan pasar dalam konteks perekonomian Indonesia merupakan keadaan ketika mekanisme penentuan harga dan distribusi barang tidak mampu berjalan secara optimal sebagaimana yang diidealkan teori ekonomi. Dalam situasi pasar yang bekerja dengan sempurna, harga terbentuk melalui interaksi alami antara permintaan dan penawaran, sehingga sumber daya dapat tersalurkan secara efisien. Namun, realitas perekonomian Indonesia menunjukkan bahwa proses tersebut sering terhambat oleh banyak faktor struktural maupun nonstruktural. Misalnya, dalam sektor pangan, masalah klasik berupa perubahan harga bahan pokok yang ekstrem hampir selalu berulang. Fluktuasi ini tidak hanya dipicu oleh musim panen dan cuaca, tetapi juga oleh rantai distribusi yang panjang serta dominasi beberapa pelaku

besar yang dapat memengaruhi jumlah barang di pasar. Hal tersebut membuat produsen kecil, seperti petani, berada pada posisi tawar yang rendah, sementara konsumen justru menjadi pihak yang harus membayar harga tinggi. Ketimpangan semacam ini memperlihatkan bahwa pasar tidak berjalan sesuai prinsip persaingan sempurna.

Di sektor industri dan energi, gejala kegagalan pasar semakin nyata karena struktur pasar yang cenderung oligopolistik. Banyak industri vital, seperti semen, baja, pupuk, atau energi, dikuasai oleh segelintir perusahaan besar yang dapat mengatur jumlah produksi dan memengaruhi harga. Dalam kondisi seperti ini, harga yang terbentuk tidak lagi mencerminkan interaksi bebas antara pembeli dan penjual, tetapi merupakan hasil strategi yang disusun oleh pelaku-pelaku besar demi mempertahankan keuntungan. Di bidang energi, situasinya semakin rumit karena Indonesia masih bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan BBM dan LPG. Harga energi dalam negeri pun akhirnya sangat sensitif terhadap perubahan nilai tukar dan situasi geopolitik internasional. Kebijakan subsidi yang diterapkan pemerintah sering kali menimbulkan dilema: ketika harga disubsidi, konsumsi menjadi berlebihan dan tidak efisien, tetapi ketika subsidi dikurangi, harga melonjak tinggi dan memberatkan masyarakat. Kedua kondisi ini sama-sama menggambarkan bahwa pasar tidak mampu mengalokasikan sumber daya secara efisien tanpa intervensi negara.

Gelombang digitalisasi yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir juga memunculkan bentuk-bentuk baru dari kegagalan pasar. Dominasi platform digital raksasa yang menguasai data pengguna menciptakan pasar yang cenderung tidak transparan dan sulit diimbangi oleh pelaku kecil. Algoritma yang digunakan platform sering kali menempatkan UMKM dalam posisi yang tidak menguntungkan karena biaya promosi tinggi dan perbedaan eksposur yang mencolok. Di sisi lain, konsumen juga berada dalam situasi yang rentan karena berbagai rekomendasi dan penawaran dikendalikan oleh sistem yang tujuannya bukan sekadar memberikan pilihan terbaik, melainkan memaksimalkan profit platform. Dalam layanan keuangan digital, khususnya pinjaman online, masalah asimetri informasi bahkan lebih jelas terlihat. Banyak pengguna, terutama yang memiliki literasi keuangan rendah, tidak memahami secara penuh ketentuan bunga, denda, serta risiko penyalahgunaan data sehingga mudah terjebak dalam kontrak yang merugikan.

Salah satu wujud kegagalan pasar yang paling berat dampaknya adalah eksternalitas negatif pada lingkungan. Aktivitas ekonomi seperti pertambangan, industri manufaktur, dan konversi fungsi hutan telah menyebabkan kerusakan lingkungan dalam skala besar. Biaya sosial yang muncul misalnya polusi udara, pencemaran sungai, hilangnya keanekaragaman hayati, serta penurunan kualitas tanah tidak dihitung dalam harga produk akhir. Akibatnya, masyarakat luas menanggung

konsekuensi dari kegiatan produksi yang tidak bertanggung jawab. Pasar tidak memberi dorongan yang cukup kepada perusahaan untuk menerapkan praktik ramah lingkungan, karena tindakan tersebut dipandang menambah biaya produksi. Kejadian seperti kabut asap, banjir akibat deforestasi, hingga pencemaran air di berbagai daerah merupakan bukti bahwa mekanisme pasar tidak mampu menjamin keberlanjutan lingkungan tanpa regulasi yang kuat.

Jika melihat seluruh gambaran tersebut, kegagalan pasar di Indonesia pada dasarnya merupakan hasil interaksi berbagai faktor: ketimpangan struktur ekonomi, perilaku pelaku usaha yang cenderung oportunistik, ketidakcukupan infrastruktur pendukung, lemahnya sistem pengawasan, serta rendahnya literasi ekonomi dan digital masyarakat. Dalam situasi seperti ini, peran pemerintah menjadi sangat penting sebagai penyeimbang melalui kebijakan, regulasi, maupun intervensi yang bertujuan mengurangi distorsi. Namun keberhasilan intervensi tersebut sangat bergantung pada konsistensi implementasi kebijakan, kualitas pengawasan, serta kemampuan pemerintah untuk menyesuaikan strategi sesuai dinamika ekonomi nasional dan global. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai berbagai bentuk kegagalan pasar menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif demi menciptakan perekonomian Indonesia yang stabil, adil, dan berkelanjutan.

2. Fungsi Alokasi Pemerintah dalam Menyediakan Barang dan Jasa Publik

Peran alokasi pemerintah muncul karena mekanisme pasar tidak selalu mampu memenuhi kebutuhan publik secara adil maupun efisien. Banyak jenis barang dan jasa yang tidak dapat disediakan sektor swasta karena sifatnya yang tidak memungkinkan individu dibatasi dalam pemanfaatannya, atau karena manfaatnya hanya dapat dirasakan bersama secara luas. Contoh nyata dari barang publik tersebut mencakup infrastruktur jalan, sarana transportasi umum, ruang terbuka hijau, layanan pendidikan, fasilitas kesehatan, serta sistem keamanan negara. Ketiadaan penyediaan barang-barang ini oleh pasar akan menimbulkan kekurangan besar bagi masyarakat, sehingga pemerintah mengambil peran langsung untuk memastikan ketersediaannya.

Dalam menjalankan fungsi alokasi, pemerintah tidak hanya memproduksi barang publik, tetapi juga mengatur agar penggunaan berbagai sumber daya dapat mendukung kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Ketika terjadi ketidaksempurnaan pasar seperti monopoli, eksternalitas, atau ketidakseimbangan informasi, pemerintah melakukan intervensi untuk memperbaiki arah alokasi agar lebih mencerminkan kesejahteraan bersama. Bentuk intervensi dapat berupa pembangunan infrastruktur, regulasi standar layanan, pemberian insentif, penyusunan anggaran prioritas, atau penyediaan layanan dasar secara langsung.

Fungsi alokasi juga berperan strategis dalam mendorong pembangunan jangka panjang. Infrastruktur berkualitas, fasilitas pendidikan yang mudah diakses, serta pelayanan kesehatan yang memadai akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat kapasitas produksi nasional. Dampak ini pada akhirnya mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil, meningkatkan daya saing, dan memperluas kesempatan usaha di berbagai sektor. Dengan kata lain, penyediaan barang publik bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga sebagai investasi penting dalam membangun perekonomian masa depan. Namun, keberhasilan fungsi alokasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan secara tepat. Perencanaan yang kurang matang dapat menyebabkan pemborosan anggaran, pembangunan yang tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat, atau ketidakefisienan dalam pelaksanaan proyek. Oleh karena itu, pengawasan, transparansi, serta tata kelola yang baik menjadi unsur penting yang memastikan bahwa fungsi alokasi benar-benar menghasilkan manfaat nyata bagi publik. Ketika proses pengelolaan dilakukan dengan baik, intervensi pemerintah akan mampu mengisi kekosongan yang tidak dapat dipenuhi pasar serta mendorong aktivitas ekonomi tetap berjalan secara stabil dan inklusif.

Dengan demikian, fungsi alokasi pemerintah merupakan fondasi dalam penyediaan barang dan jasa publik yang vital bagi kehidupan masyarakat. Melalui kebijakan yang terarah dan pengelolaan yang efektif, pemerintah dapat memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memperoleh akses terhadap layanan penting, sekaligus memperkuat pondasi pembangunan nasional secara berkesinambungan.

3. Efektivitas Regulasi Pemerintah dalam Mengatasi Distorsi Pasar

Keberadaan regulasi pemerintah memiliki fungsi vital dalam memastikan aktivitas ekonomi tidak menyimpang dari prinsip persaingan sehat. Mekanisme pasar pada dasarnya tidak selalu mampu mengoreksi ketidaksempurnaan yang muncul dalam proses penawaran dan permintaan. Dalam banyak kasus, kelompok pelaku usaha tertentu dapat mengambil keuntungan dari celah pasar yang tidak terawasi, sehingga menimbulkan praktik-praktik yang merusak keseimbangan. Oleh karena itu, intervensi negara dibutuhkan untuk membatasi, mengawasi, serta mengarahkan kegiatan ekonomi agar berjalan lebih adil dan tidak menghasilkan ketimpangan. Salah satu bentuk distorsi yang paling sering ditemui ialah kecenderungan pelaku usaha besar untuk menguasai pasar melalui pengaturan harga ataupun pembatasan suplai. Untuk mencegah praktik semacam itu, pemerintah membentuk lembaga pengawas seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Lembaga ini bertugas menelusuri dugaan pelanggaran, melakukan pemeriksaan, hingga menjatuhkan sanksi apabila ditemukan bukti adanya tindakan yang merugikan pasar. Sejumlah industri strategis seperti pangan, bahan bangunan, dan energi tidak jarang

menjadi fokus penyelidikan karena rawan terjadi persekongkolan yang dapat menekan konsumen. Upaya KPPU bertujuan memastikan bahwa pasar tetap terbuka dan kompetitif.

Di sisi lain, regulasi negara juga dibutuhkan untuk menjaga posisi konsumen yang sering kali berada dalam keadaan kurang informasi. Ketika informasi tidak tersedia secara seimbang, konsumen dapat mengambil keputusan ekonomi yang merugikan diri mereka. Kondisi ini semakin menonjol di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital yang melahirkan beragam layanan baru seperti platform pinjaman online, e-commerce, hingga aplikasi keuangan berbasis data. Pemerintah melalui BPKN dan lembaga terkait terus memperbaiki standar perlindungan konsumen, termasuk dengan meningkatkan transparansi produk, memperkuat sistem pengawasan, serta menyediakan layanan aduan yang mudah dijangkau masyarakat. Selain itu, pemerintah juga menetapkan berbagai kebijakan untuk mengendalikan harga barang-barang penting agar tidak terjadi fluktuasi ekstrem. Komoditas seperti beras, bahan bakar, LPG, dan minyak goreng memiliki pengaruh besar terhadap tingkat inflasi serta kestabilan ekonomi rumah tangga. Tanpa kebijakan tertentu, perubahan kecil pada pasokan dapat memicu kenaikan harga yang tidak wajar. Maka dari itu, negara melakukan campur tangan melalui penetapan harga acuan, penambahan pasokan dari cadangan, subsidi, hingga operasi pasar agar harga tetap berada pada tingkat yang dapat dijangkau masyarakat luas.

Penerapan regulasi di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Pengawasan belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah, koordinasi antarinstansi sering kali tidak sinkron, serta respons kebijakan terhadap dinamika pasar kerap berjalan lambat. Selain itu, perkembangan digital yang sangat cepat membuat sebagian regulasi menjadi kurang relevan sehingga perlu diperbarui. Untuk meningkatkan efektivitasnya, pemerintah perlu memanfaatkan teknologi modern dalam proses pengawasan. Sistem pemantauan harga berbasis internet, analisis big data, dan integrasi data antarinstansi merupakan langkah strategis yang dapat mempercepat deteksi dini terhadap anomali pasar. Tidak hanya itu, peningkatan keterampilan aparatur pengawas, penyederhanaan prosedur regulasi, serta edukasi masyarakat mengenai hak-hak ekonomi juga menjadi faktor penting untuk mendukung terciptanya pasar yang lebih transparan dan efisien.

4. Tantangan dan Arah Kebijakan untuk Menjaga Keseimbangan Perekonomian

Menjaga stabilitas perekonomian nasional menjadi tugas yang semakin menantang di tengah perubahan lingkungan global yang cepat dan kondisi domestik yang terus bergerak dinamis. Keseimbangan ekonomi tidak hanya ditopang oleh kemampuan sektor produksi, tetapi juga oleh kesiapan negara dalam mengelola risiko fiskal, menjaga ketahanan komoditas strategis, serta menyesuaikan struktur industri dengan

perkembangan teknologi. Jika berbagai tantangan tersebut tidak ditangani secara terukur, potensi guncangan pada perekonomian dapat meningkat dan menghambat proses pembangunan jangka panjang. Salah satu permasalahan terbesar yang dihadapi Indonesia adalah tekanan pada kapasitas fiskal. Pertumbuhan kebutuhan pembiayaan negara, misalnya untuk infrastruktur, layanan sosial, dan subsidi, berlangsung lebih cepat dibanding peningkatan pendapatan nasional, terutama dari sektor perpajakan. Kondisi ini membuat manajemen defisit anggaran harus dilakukan secara hati-hati agar tidak memengaruhi kredibilitas fiskal dan stabilitas makroekonomi. Optimalisasi penerimaan pajak, pengawasan belanja, serta pergeseran anggaran menuju aktivitas yang lebih produktif menjadi keniscayaan bagi pemerintah.

Selain isu fiskal, ketergantungan terhadap impor bahan baku dan komoditas vital juga menempatkan perekonomian pada posisi rentan. Harga global yang berfluktuasi, gangguan distribusi akibat konflik internasional, serta tekanan pada logistik dunia dapat langsung berdampak pada struktur biaya domestik. Ketidakstabilan harga pangan dan energi menjadi bukti bahwa Indonesia perlu memperkuat kemandirian sektor-sektor tersebut melalui peningkatan kapasitas produksi nasional, modernisasi pertanian, dan diversifikasi sumber energi.

Tantangan lainnya adalah ketidakseimbangan aktivitas ekonomi antardaerah. Pusat-pusat pertumbuhan cenderung terkonsentrasi di wilayah tertentu, sementara daerah lain masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, investasi, dan akses pasar. Ketimpangan ini dapat memengaruhi pemerataan pendapatan, menurunkan efisiensi rantai pasok nasional, dan memperlambat pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, distribusi pembangunan yang lebih merata perlu diupayakan melalui perluasan konektivitas antarwilayah, penyediaan fasilitas investasi yang lebih inklusif, serta percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Dari sisi perkembangan teknologi, perekonomian Indonesia juga menghadapi tantangan besar akibat perubahan struktur pekerjaan. Digitalisasi dan otomatisasi membuat banyak jenis pekerjaan mengalami transformasi, bahkan berisiko tergantikan oleh teknologi. Jika tidak dibarengi peningkatan kualitas sumber daya manusia, perubahan ini dapat memperluas kesenjangan kompetensi antara tenaga kerja dan kebutuhan industri. Pemerintah perlu menyiapkan kebijakan pendidikan dan pelatihan yang lebih adaptif agar tenaga kerja nasional mampu bersaing pada era ekonomi baru. Untuk menjawab ragam tantangan tersebut, arah kebijakan harus disusun secara terintegrasi dan berkelanjutan. Penguatan efektivitas belanja negara, perluasan basis perpajakan, serta perbaikan tata kelola fiskal perlu menjadi prioritas utama agar pemerintah memiliki ruang kebijakan yang memadai. Pada saat yang sama, ketahanan pangan dan energi harus diperkuat melalui modernisasi sektor

produktif, pembangunan fasilitas penyimpanan dan distribusi, serta investasi pada energi terbarukan.

Perbaikan iklim usaha juga harus menjadi fokus agar investasi dapat masuk lebih luas dan merata. Penyederhanaan regulasi, peningkatan layanan digital pemerintah, dan harmonisasi kebijakan pusat-daerah akan menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih kondusif. Untuk mendukung transformasi industri, pemerintah perlu mendorong penelitian, inovasi teknologi, dan pengembangan industri berbasis digital sebagai bagian dari strategi jangka panjang meningkatkan daya saing ekonomi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil studi dan diskusi yang telah dilakukan, bahwa kegagalan pasar masih menjadi masalah mendasar dalam perekonomian Indonesia dan muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari ketidakseimbangan struktur pasar, lemahnya persaingan, hingga eksternalitas yang merugikan masyarakat. Kondisi tersebut membuktikan bahwa mekanisme pasar tidak selalu mampu menciptakan alokasi yang efisien maupun pemerataan kesejahteraan tanpa adanya campur tangan pemerintah. Peran pemerintah menjadi sangat penting ketika pasar tidak mampu memberikan akses layanan publik dan sumber daya secara seimbang. Melalui fungsi alokasi, negara menyediakan infrastruktur dan layanan dasar yang tidak dapat dipenuhi oleh sektor swasta karena keterbatasan keuntungan ekonomi. Ketersediaan fasilitas publik ini tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membantu mengurangi ketimpangan antarwilayah.

Dalam fungsi distribusi, pemerintah berupaya memperkecil jurang ketimpangan melalui kebijakan perpajakan, bantuan sosial, dan subsidi. Kebijakan ini membantu menjaga stabilitas konsumsi masyarakat rentan, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan berupa ketidakakuratan data dan lemahnya cakupan fiskal terhadap sektor informal. Fungsi regulasi menjadi instrumen penting untuk menjaga agar persaingan usaha tetap sehat. Pengawasan terhadap praktik monopoli atau pengaturan harga merupakan langkah yang diperlukan agar pasar tidak dikuasai oleh kelompok tertentu. Namun, efektivitas fungsi regulatif masih perlu diperkuat melalui harmonisasi aturan dan peningkatan koordinasi antar lembaga.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa peran negara tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga keseimbangan perekonomian nasional. Untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks, pemerintah perlu memperkuat kapasitas fiskal, meningkatkan akurasi data penerima program, serta memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan anggaran dan pengawasan pasar. Dengan langkah-langkah tersebut, intervensi pemerintah dapat berjalan lebih efektif dalam mengatasi kegagalan pasar dan mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Arifin, M., & Nugroho, S. (2023). Analisis kebijakan persaingan usaha dan dampaknya pada sektor pangan Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Bisnis*, 12(1), 55–67.
- Baderi, F., & Harjowiryono, M. (2023). Peran kebijakan fiskal dalam menjaga kestabilan perekonomian nasional. *Neraca*. Retrieved from <https://www.neraca.co.id/article/183869>
- Bappenas. (2023). *Laporan tahunan pembangunan nasional*. Jakarta, Indonesia: Kementerian PPN/Bappenas. Retrieved from <https://www.bappenas.go.id>
- Bank Indonesia. (2024). *Dokumen kebijakan moneter nasional tahun 2024*. Jakarta, Indonesia: Bank Indonesia. Retrieved from <https://www.bi.go.id>
- Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. (2023). *Outlook kebijakan fiskal dan pembiayaan negara 2023*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Febrianti, R., Riovita, V., & Com, S. E. (2025). Studi evaluatif terhadap kebijakan distribusi fiskal dalam mengatasi kesenjangan sosial. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(2), 112–123.
- Hafizd, M., Janwari, Y., & Al-Hakim, A. (2024). Integrasi kebijakan fiskal dan moneter sebagai respon atas dinamika ekonomi. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 6(1), 33–47.
- HSB Investasi. (2023). *Ulasan mengenai fungsi kebijakan fiskal dalam perekonomian Indonesia*. Retrieved from <https://blog.hsb.co.id/pengetahuan-keuangan/>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *APBN Kita: Analisis kinerja fiskal dan realisasi anggaran*. Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita>
- Kompas Money. (2024, March 30). Penjelasan mengenai tiga fungsi utama kebijakan fiskal beserta praktiknya. *Kompas*. Retrieved from <https://money.kompas.com/read/2024/03/30/153225726>
- KPPU. (2024). *Laporan tahunan pengawasan persaingan usaha 2024*. Jakarta, Indonesia: Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Retrieved from <https://www.kppu.go.id>
- Oktivany, R., Agustria, D., & Tika, M. (2024). Pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap perkembangan ekonomi daerah. *Jurnal Ekonomi Regional*, 7(1), 14–26.

Putra, S. K., Setiani, W., Astuti, D., & Pangestoeti, W. (2025). Analisis fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam kebijakan fiskal Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 3(6), 408–416.